

ANALISIS PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN WONOGIRI**Evita Purnamasari¹, Indra Hastuti², Esti Dwi Rahmawati³**

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Correspondence		
Email: : purnamasarievita9@gmail.com	No. Telp:	
Submitted : 18 Agustus 2025	Accepted : 24 Agustus 2025	Published : 25 Agustus 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perdagangan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Wonogiri. Latar belakang penelitian ini menyoroti permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Indonesia, di mana UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri berperan penting dalam pemberdayaan UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan manajemen usaha, digitalisasi, penyederhanaan proses perizinan, dan subsidi bunga pinjaman. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, birokrasi perizinan yang rumit, dan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital. Dampak dari program pemberdayaan ini terlihat dari peningkatan kapasitas dan daya saing produk UMKM, serta akses pasar yang lebih luas. Dinas Perdagangan tetap berkomitmen untuk mendukung UMKM meskipun tantangan yang dihadapi masih signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif di Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci: Dinas Perdagangan, Pemberdayaan UMKM, Kabupaten Wonogiri, Kemandirian Ekonomi, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan melibatkan berbagai aspek. Upaya penanggulangannya sering kali menemui hambatan karena kurangnya pemahaman mengenai penyebab dari kemiskinan. Menurut Eko (2011), salah satu akar utama dari kemiskinan adalah terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Jika permasalahan mendasar ini tidak segera ditangani, maka jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan akan terus meningkat. Setiap daerah seharusnya berperan aktif dalam konsep dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan kemandirian lokal. Dengan mengacu pada konsep kemandirian lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai langkah menuju Indonesia yang mandiri dapat tercapai. Upaya ini dapat diwujudkan dengan menjaga dan mengembangkan potensi-potensi daerah secara berkelanjutan. Apabila kemandirian lokal mampu mendorong pertumbuhan serta pembangunan nasional khususnya dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan maka mewujudkan cita-cita bangsa untuk memberdayakan masyarakat kecil bukanlah hal yang sulit. Dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, UMKM tersebar luas di hampir semua sektor ekonomi dengan jumlah yang sangat besar. Kedua, sektor ini memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki UMKM, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah untuk mendukung dan memberdayakan sektor ini.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri mencatat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 1.054.145 jiwa dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah

Garis Kemiskinan) di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan yaitu dari 10,94 pada tahun 2023, menjadi 10,71 pada tahun 2024.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang mendominasi struktur usaha, dengan jumlah lebih dari 99% dari total unit usaha yang ada. UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Dengan adanya UMKM, potensi ekonomi di tingkat lokal dapat dikembangkan secara optimal, baik melalui pemanfaatan sumber daya alam maupun tenaga kerja yang tersedia di wilayah tersebut.

Pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan observasi awal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM, sektor UMKM berkontribusi hampir setengah dari total perekonomian kabupaten tersebut. Namun demikian, potensi UMKM belum sepenuhnya mampu dimaksimalkan secara optimal. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri adalah masih rendahnya kepemilikan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkannya karena kurangnya informasi tentang penyediaan sertifikat halal secara gratis oleh pemerintah. Meskipun UMKM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun eksistensinya masih dibayangi berbagai tantangan. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Perdagangan turut berperan sebagai fasilitator dalam upaya pembinaan dan pengembangan UMKM.

Menurut keterangan dari para pelaku UMKM, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam pengembangan usaha, khususnya pada aspek kreativitas produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pemberdayaan yang lebih optimal dari Dinas Perdagangan. Dinas tersebut memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perkoperasian serta pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "*Analisis Peran Dinas Perdagangan Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Wonogiri*".

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi antara peneliti dan informan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik, melainkan melalui pemahaman terhadap proses, kebijakan, dan pengalaman pelaku di lapangan. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri yang beralamat Jl RM. Said No. 03, Joho, Kaliancar, Kec. Selogiri serta beberapa pelaku UMKM binaan dinas tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada

1. Bentuk-bentuk peran Dinas Perdagangan dalam memberdayakan UMKM.
2. Program atau kegiatan yang dilakukan dinas untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
3. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
4. Respon dan dampak yang dirasakan pelaku UMKM terhadap peran dinas

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari

1. Data primer

Diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan terkait, Informan tersebut adalah;

- a) Bapak Drs. Dwi Sudarsono (Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
- b) Ibu Nining (Pelaku UMKM Rambak Mbak Ning Pokoh)
- c) Bapak Putra (Pelaku UMKM Bandros Rangen)
- d) Ibu Yani (Pelaku UMKM Kue Cucur)
- e) Ibu Santi (Pelaku UMKM Peyek Arjuna)
- f) Ibu Sulastri (Pelaku UMKM Black Garlic)

2. Data sekunder

Berasal dari dokumen resmi dinas, laporan kegiatan, website dinas, RPJMD Wonogiri, literatur yang relevan.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau menjadi sumber data dalam penelitian. Informan adalah individu yang dipilih secara strategis karena memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus tentang topik penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada peneliti. Berikut informan dalam penelitian ini

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dwi Sudarsono	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	1 Orang
2	Yani	Pemilik UMKM	1 Orang
3	Ninig	Pemilik UMKM	1 Orang
4	Sulastri	Pemilik UMKM	1 Orang
5	Santi	Pemilik UMKM	1 Orang
6	Yakobus Putra	Pemilik UMKM	Orang

F. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara agar data yang diperoleh lebih lengkap, valid, dan relevan dengan fokus penelitian antara lain ;

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) Dilakukan kepada informan kunci seperti kepala bidang atau staf Dinas Perdagangan, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya.
2. Observasi, peneliti mengamati langsung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM serta interaksi antara dinas dan pelaku usaha.
3. Dokumentasi, mengumpulkan data dari arsip, laporan kegiatan, foto, brosur, atau media daring milik Dinas Perdagangan dan UMKM.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh *Miles dan Huberman*, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan berfungsi untuk menggambarkan secara menyeluruh peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Wonogiri

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam proses analisis, di mana peneliti menyaring dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, agar fokus hanya pada informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Data yang berasal dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi poin-poin penting, seperti pelaksanaan program oleh Dinas Perdagangan, tanggapan dari pelaku UMKM, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Proses ini membantu menghilangkan informasi yang kurang relevan, sehingga peneliti dapat lebih fokus pada aspek-aspek utama yang mendukung pemahaman mengenai peran Dinas Perdagangan

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data akan dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan hasil-hasil utama yang ditemukan di lapangan. Selain itu, penyajian dalam bentuk tabel atau matriks juga digunakan untuk memperjelas perbandingan antarprogram pemberdayaan serta pengaruhnya terhadap UMKM. Penyajian data ini berfungsi untuk menunjukkan pola dan hubungan antarvariabel, serta membantu pembaca dalam memahami konteks secara keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir dalam analisis adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti mengevaluasi data yang telah disajikan guna mengidentifikasi temuan utama. Dalam hal ini, peneliti akan merumuskan kontribusi nyata Dinas Perdagangan terhadap pemberdayaan UMKM di Kabupaten Wonogiri, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Kesimpulan disusun berdasarkan bukti yang kuat dan valid, serta diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Harapannya, hasil kesimpulan ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi Dinas Perdagangan maupun pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.

H. Uji Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan atau sumber guna memastikan bahwa data tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Dengan mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber, peneliti dapat menemukan kesamaan dan perbedaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan validitas data yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik mencakup penggunaan berbagai metode dalam pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan mengintegrasikan berbagai teknik ini, peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan meminimalkan potensi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu metode saja.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah metode yang melibatkan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa informasi tetap konsisten. Ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan yang sama pada waktu yang berbeda atau dengan membandingkan data dari periode sebelumnya untuk mengidentifikasi perubahan atau tren yang mungkin terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Dinas Perdagangan

Sejarah Dinas Perdagangan Di Kabupaten Wonogiri melalui beberapa transformasi struktural dari unit gabungan menjadi lembaga pemerintah khusus. Berikut transformasi dari Dinas Perdagangan

a. Era Penggabungan Awal (2001–2007): Modal Birokrasi UMKM Diintegrasikan dalam Dinas Gabungan

- 1) Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan otonomi daerah dengan membentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal (Perda No. 3 Tahun 2001). Dinas ini menyatukan berbagai kewenangan, termasuk perdagangan dan pembinaan koperasi mikro, sebagai respon langsung terhadap tuntutan reformasi birokrasi awal pemerintahan daerah. Kendati belum memiliki struktur khusus UMKM, penggabungan ini secara implisit menyediakan saluran bagi kebijakan pelayanan mikro dan koperasi
- 2) Tahun 2008, Perda Kabupaten Wonogiri No. 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mulai menata ulang struktur OPD lokal, menyesuaikan dengan amanat PP No. 38/2007 dan 41/2007. Meskipun status perdagangan tetap bagian dari dinas gabungan, aspek pelatihan teknis dan pembinaan mulai dijabarkan secara lebih formal, menyiapkan fondasi kelembagaan yang lebih fleksibel untuk pelatihan dan fasilitasi skala mikro.

b. Era Konsolidasi Terpusat (2016–2022), menjadi Dinas Perdagangan Koperasi UKM

- a) Kebijakan reorganisasi nasional melalui Perda No. 13 Tahun 2016 mereformasi struktur Dinas di Wonogiri. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebagai OPD tipe A atau B mendorong pusat kelembagaan hakekatnya dalam menangani UMKM sebagai unit administrasi tunggal.

c. Pemisahan dan Spesialisasi (2023 sampai sekarang). Dinas Perdagangan Mandiri Fokus UMKM

- a) Perda No. 5 Tahun 2023 memisahkan urusan Perdagangan dan KUKM dari Industri, memungkinkan pembentukan OPD Perdagangan yang lebih fokus terhadap urusan distribusi, stabilisasi harga, serta pembinaan ritel dan digital. Perbup No. 63 Tahun 2023, berlaku efektif 1 Januari 2024, secara struktural merumuskan dengan jelas tugas tiap bidang di dalam Dinas Perdagangan dan KUKM.
 - (1) Bidang pengawasan distribusi dan stabilisasi harga
 - (2) Bidang pembinaan perdagangan tradisional dan modern
 - (3) Bidang perlindungan konsumen dan informasi perdagangan
 - (4) UPT pendukung, Pasar Rakyat, Metrologi Legal, dan Layanan Konsumen (Sertifikasi dan Mediasi sengketa)

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan

Sebagai organisasi yang profesional, Dinas Perdagangan menjalankan tugasnya berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai pedoman utama. Visi dan misi ini berfungsi sebagai arah strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun program kerja, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan industri dan perdagangan yang berkelanjutan. Visi dan misi Dinas Perdagangan di Kabupaten Wonogiri yaitu.

1. Visi

Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri

2. Misi

Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri adalah

- 1) Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya
- 2) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- 4) Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri menempati posisi strategis sebagai lembaga pelaksana teknis pemerintahan dalam sektor industri dan perdagangan, serta berkontribusi signifikan terhadap penguatan struktur perekonomian daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas ini memiliki kedudukan kelembagaan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut.

a. Kedudukan Dinas Perdagangan

Kedudukan Dinas Perdagangan dan KUKM Kabupaten Wonogiri ditetapkan melalui dua regulasi utama. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, sebagaimana diubah melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023, menempatkan instansi ini sebagai perangkat daerah tipe A yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang perdagangan dan KUKM pada skala kabupaten. Kedua, melalui Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023, diatur secara eksplisit bahwa.

- 1) Dinas Perdagangan dan KUKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kabupaten (Sekretariat Daerah).
- 2) Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan status jabatan teknis tinggi pratama (JPT Pratama)
- 3) Secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atas pelaksanaan fungsi perdagangan dan pemberdayaan UMKM dalam batas kewenangan daerah.

b. Tugas Dinas Perdagangan

Perbup No. 63 Tahun 2023 menetapkan bahwa tugas pokok Dinas mencakup.

- a) Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan KUKM, termasuk tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi
- b) Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kebijakan daerah di sektor perdagangan
- c) Menyenggarakan koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga teknis seperti Bappeda, Dinas Perindustrian, dan UPT Pasar dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan kerja lintas satuan organisasi.

c. Fungsi Dinas Perdagangan

- a) Perumusan kebijakan teknis, mencakup regulasi perdagangan, metrologi, distribusi bahan pokok, dan perlindungan konsumen.
- b) Pelaksanaan kebijakan, termasuk promosi pasar, pengelolaan perizinan UMKM, pengawasan metrologi, dan penguatan daya saing KUKM.
- c) Evaluasi dan pelaporan, memantau capaian kinerja dan menyusun laporan kepada Bupati dan DPRD.
- d) Administrasi internal dan tata kerja, menyelenggarakan perencanaan anggaran, sekretariat, serta pengelolaan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan tugas tambahan, sesuai penugasan khusus dari Bupati di luar tugas utama yang tetap dalam lingkup kewenangan lembaga.

4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Struktur organisasi merupakan acuan utama dalam membangun kerangka kelembagaan yang sistematis. Dengan struktur tersebut, setiap pegawai dapat dikenali secara operasional sesuai kedudukan dan wewenangnya dalam organisasi. Selain itu, struktur organisasi menyediakan garis kerja administratif yang memfasilitasi koordinasi internal sehingga proses pekerjaan yang bersifat teknis maupun administratif dapat berjalan secara sinkron dan efektif.

PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perdagangan Dalam Memberdayakan UMKM

Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha UMKM di daerah tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran Dinas Perdagangan dalam pemberdayaan UMKM.

a. Program Pelatihan

Dinas Perdagangan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Pelatihan ini mencakup

- 1) Pelatihan Manajemen Usaha, program ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku usaha, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha. Materi yang diajarkan meliputi perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen usaha, pelaku UMKM diharapkan dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan efektif.
- 2) Pelatihan Teknis Produksi, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan teknis yang berfokus pada peningkatan keterampilan produksi. Pelatihan ini mencakup teknik produksi yang lebih modern, penggunaan alat dan mesin yang efisien, serta penerapan standar kualitas produk. Dengan keterampilan yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga lebih kompetitif di pasar.

b. Digitalisasi Usaha

Dalam era digital saat ini, Dinas Perdagangan juga berperan dalam mendorong digitalisasi usaha UMKM. Program digitalisasi ini mencakup

- 1) Pengenalan Teknologi Informasi, Dinas Perdagangan memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memasarkan produk secara online. Pelaku UMKM diajarkan cara menggunakan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi pemasaran digital lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
- 2) Pengembangan Website dan E-Commerce, Dinas Perdagangan membantu pelaku UMKM dalam membangun website atau toko online, sehingga mereka dapat memasarkan produk secara langsung kepada konsumen tanpa harus bergantung pada perantara. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses pasar, tetapi juga memungkinkan pelaku UMKM untuk menjual produk mereka secara lebih efisien.

c. Kemudahan Perizinan

Dinas Perdagangan berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku UMKM. Beberapa langkah yang diambil meliputi.

- 1) Penyederhanaan Proses Perizinan, Dinas Perdagangan telah melakukan upaya untuk menyederhanakan prosedur pengajuan izin usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya kemudahan ini, pelaku UMKM dapat lebih cepat mendapatkan izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka secara legal.

- 2) Sertifikasi Halal dan SNI, Dinas Perdagangan juga memberikan dukungan dalam proses sertifikasi halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk UMKM. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di sektor makanan dan minuman. Dinas Perdagangan berperan sebagai fasilitator dalam proses pendaftaran dan pengajuan sertifikasi, sehingga pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ada.

d. Subsidi Bunga Pinjaman

Dinas Perdagangan juga berperan dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui program subsidi bunga pinjaman. Beberapa aspek dari program ini meliputi.

- 1) Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan, Dinas Perdagangan menjalin kerja sama dengan bank daerah dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah bagi pelaku UMKM. Dengan adanya subsidi bunga, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi.
- 2) Pemberian Informasi dan Pendampingan, Dinas Perdagangan memberikan informasi mengenai program subsidi bunga pinjaman kepada pelaku UMKM dan mendampingi mereka dalam proses pengajuan pinjaman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini dengan baik dan mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan usaha mereka.

e. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Perdagangan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, Dinas Perdagangan dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif di masa depan.

Dengan berbagai program dan inisiatif tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan kapasitas mereka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM di Kabupaten Wonogiri.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pemberdayaan UMKM

Meskipun Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan berbagai program untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kendala-kendala yang dihadapi.

a. Keterbatasan Anggaran

Sumber Daya Terbatas, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan UMKM sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM yang ada. Hal ini mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau bahkan terpaksa dibatalkan. Prioritas Penggunaan Anggaran, dalam situasi keterbatasan anggaran, Dinas Perdagangan harus memilih prioritas program yang akan dilaksanakan. Ini sering kali mengakibatkan program-program yang dianggap kurang mendesak atau kurang populer terabaikan, meskipun program tersebut sebenarnya penting untuk pengembangan UMKM. Dampak pada Kualitas Program, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kualitas pelatihan dan program yang diselenggarakan. Dengan anggaran

yang terbatas, Dinas Perdagangan mungkin tidak dapat menghadirkan narasumber yang berkualitas, materi pelatihan yang komprehensif, atau fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program.

b. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterampilan dan pengetahuan yang terbatas banyak pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri yang masih memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas dalam mengelola usaha mereka. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan ilmu yang didapat dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam, pelaku UMKM sulit untuk menerapkan praktik terbaik dalam manajemen usaha. Keterbatasan Pelatihan Berkelanjutan, meskipun Dinas Perdagangan telah menyelenggarakan pelatihan, tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti semua sesi pelatihan yang ditawarkan. Keterbatasan waktu, biaya, dan aksesibilitas menjadi faktor yang menghambat partisipasi mereka. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kekurangan Tenaga Ahli, Dinas Perdagangan juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan tenaga ahli yang dapat memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkualitas. Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas program pemberdayaan yang dilaksanakan.

c. Birokrasi Perizinan yang Rumit

Proses perizinan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam memahami prosedur yang harus dilalui, sehingga mereka cenderung menghindari proses perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal. Kurangnya Sosialisasi, Dinas Perdagangan belum sepenuhnya melakukan sosialisasi yang efektif mengenai prosedur perizinan kepada pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan izin, sehingga mereka terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Ketidakpastian dalam proses perizinan dapat mengakibatkan pelaku UMKM tidak berani untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka mungkin merasa ragu untuk melakukan investasi lebih lanjut jika tidak memiliki kepastian hukum mengenai status usaha mereka.

d. Belum Terbentuknya Lembaga Distribusi Formal

Salah satu kendala signifikan yang dihadapi oleh UMKM adalah belum adanya lembaga distribusi formal yang dapat membantu mereka dalam memasarkan produk ke pasar ritel modern, seperti Indomaret. Tanpa adanya lembaga distribusi yang terorganisir, pelaku UMKM kesulitan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Banyak pelaku UMKM masih bergantung pada saluran distribusi tradisional, seperti pasar lokal dan penjualan langsung. Hal ini membatasi potensi pasar mereka dan mengurangi daya saing produk mereka di pasar yang lebih besar.

Tanpa adanya lembaga distribusi yang efektif, pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan pemasaran produk secara profesional. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk melakukan promosi yang efektif, sehingga produk mereka tidak dikenal oleh konsumen yang lebih luas.

e. Kesenjangan Digital dan Branding

Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usaha mereka. Keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat teknologi menjadi penghalang bagi mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar yang semakin digital. Banyak produk UMKM yang tidak memiliki branding yang kuat dan menarik. Tanpa branding yang baik, produk mereka sulit untuk

bersaing dengan produk dari perusahaan besar yang memiliki anggaran pemasaran yang lebih besar. Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya branding dan cara melakukannya dengan efektif. Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi dalam program pemberdayaan UMKM. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini sangat penting agar program-program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di daerah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Wonogiri berperan penting dalam pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, mendorong digitalisasi usaha, menyederhanakan proses perizinan, dan menyediakan subsidi bunga pinjaman untuk akses pembiayaan yang lebih baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM meliputi keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, birokrasi perizinan yang rumit, serta kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital dan branding.
3. Program pemberdayaan memberikan dampak positif, seperti peningkatan kapasitas dan efisiensi pelaku UMKM, daya saing produk yang lebih baik, akses pasar yang lebih luas melalui digitalisasi, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Dinas Perdagangan tetap berkomitmen untuk mendukung UMKM meskipun ada tantangan yang dihadapi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Analisis Peran Dinas Perdagangan Dalam Memberdayakan UMKM di Kabupaten Wonogiri, ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti yaitu

1. Perluasan kanal komunikasi digital, seperti media sosial resmi dan aplikasi pendamping UMKM, penting untuk memastikan pelaku usaha dapat mengakses informasi pemberdayaan dengan cepat dan merata.
2. Mempercepat pembentukan lembaga distribusi formal atau koperasi untuk memperluas pemasaran produk UMKM
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pasar tradisional agar sesuai dengan standar SNI, menjadikannya pusat distribusi dan promosi produk UMKM yang aman dan higienis.
4. Pelatihan teknis dan manajerial harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang sederhana dan aplikatif, serta memperkuat kolaborasi lintas dinas dan lembaga pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha.
5. Program pemberdayaan harus menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk di desa pelosok, dengan pendekatan jemput bola melalui fasilitator desa atau kader UMKM untuk menutup kesenjangan distribusi program.
6. Diperlukan sistem evaluasi yang sistematis untuk mengukur efektivitas program secara berkala, melibatkan pelaku UMKM dalam proses evaluasi agar program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, Indra. (2012). Perkembangan Usaha Industri Kerajinan Gerabah, Faktor yang Mempengaruhi, dan Strategi Pemberdayaannya pada Masyarakat di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-10.
- Faizal, R. R., Prabowo, A., Ardianto, R., & Rahmawati, E. D. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis UMKM Ramtaro Peyek “Carepey”. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan*
- Aldiniatul, I., & Eriyanti, F. (2023). Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (IKM) Di Desa Batu Sandaran.
- F. M., Said, M. M., & Hayat. (2023). Peran Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan UMKM.
- Easter, L. P., Sambiran, S., & Monintja, D. (2023). Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Minyak Kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zakaria, A. M., & Nurhayam. (2022). Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM di Kota
- B Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rappoport, J. (1987). *Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology*. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2021). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021*. Wonogiri: BPS Kabupaten Wonogiri.
- Eko, S. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2020). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, T. (2009). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2001). *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Wonogiri*.

- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri*
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 (struktur OPD)*
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2023). *Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan KUKM*. Berlaku 1 Januari 2024